



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Januari 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Tindaklanjut pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU No. 2 Tahun 2023 tentang ASN; 2. Evaluasi Rekrutmen CASN 2023; 3. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda tindaklanjut pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU No. 2 Tahun 2023 tentang ASN, evaluasi rekrutmen CASN 2023, dan lain-lain, hari Rabu, 17 Januari 2024, dibuka pukul 13.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda tindaklanjut pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU No. 2 Tahun 2023 tentang ASN, evaluasi rekrutmen CASN 2023, dan lain-lain, yaitu:

I. KEMENTERIAN PANRB

1. Penyusunan RPP Manajemen ASN
 - a. Pokok-pokok materi Manajemen ASN antara lain: perencanaan kebutuhan dan pengadaan, jabatan ASN, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem penghargaan dan pengakuan
 - b. Timeline penyusunan RPP Manajemen ASN
RPP ditargetkan selesai pada 30 April 2024. Kementerian PANRB sedang mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden pada tanggal 29 Desember 2023 dan saat ini telah diterima Sekretariat Negara pada tanggal 2 Januari 2024 untuk dilaporkan ke Presiden.
2. Kebijakan dan evaluasi pengadaan CASN tahun 2023
 - a. Profil ASN
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023
 - c. Kebutuhan CASN nasional umum, penetapan dan kelulusan tahun 2021-2023
 - d. Statistik pelamar ASN tahun 2023
 - e. Statistik kelulusan formasi ASN tahun 2023
 - f. Statistik kelulusan formasi CASN tahun 2023
 - g. Profil tenaga non ASN
 - h. Progress dan proyeksi penyelesaian tenaga non ASN
3. Pengadaan CASN Tahun 2024
 - a. Pengumuman kebutuhan CASN 2024 oleh Presiden
 - b. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024
 - c. Konsep mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024

II. BKN

1. Jadwal seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023 berikut dengan jadwal penyesuaiannya
2. Progress pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK tahun 2023
3. Nilai ambang batas seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023

4. Titik lokasi dalam negeri dan titik lokasi luar negeri seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023
5. Profil tenaga non ASN
6. Rencana pelaksanaan CASN tahun 2024

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda tindaklanjut pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU No. 2 Tahun 2023 tentang ASN, evaluasi rekrutmen CASN 2023, dan lain-lain, sebagai berikut:

1. Dengan telah diumumkannya kebutuhan CASN tahun 2024 oleh Presiden, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB segera menyelesaikan penyusunan RPP Manajemen ASN sebelum 30 April 2024 sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN mengingat pengadaan ASN merupakan salah satu materi yang diatur dalam PP Manajemen ASN.
2. Terkait belum optimalnya usulan formasi dari pemerintah daerah yang tidak terisi pada seleksi CASN Tahun 2023 yaitu sebanyak 27,55% formasi CPNS dan 23,34% formasi PPPK, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN RB dan BKN untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga dalam seleksi CASN 2024 formasi yang disediakan berkesesuaian dengan kebutuhan pemerintah daerah.
3. Dalam rangka menyelesaikan penataan Tenaga Non-ASN berjumlah 2,3 juta paling lambat pada Desember 2024 mendatang, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN RB dan BKN menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi II DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer agar diangkat sebagai PPPK.
4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pembayaran penghasilan ASN terutama PPPK di lingkungan pemerintah daerah.
5. Dalam rangka mencegah berbagai permasalahan pada seleksi CASN 2023 muncul kembali, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN melakukan upaya perbaikan dalam setiap tahapan seleksi CASN agar seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 dapat berjalan secara objektif, profesional dan transparan sehingga

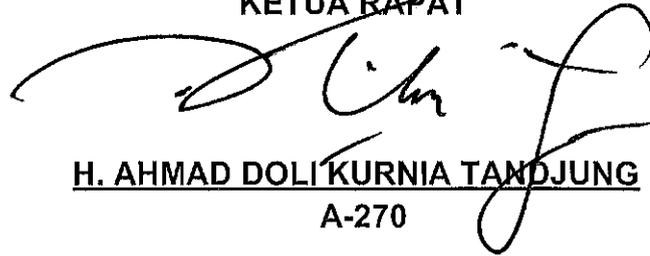
menghilangkan praktik-praktik perjokian serta kecurangan yang merugikan hak-hak warga negara.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.56 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2024

KETUA RAPAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title.

H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270